

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan Hukum yang berjudul “Unsur Pidana Dalam Pertandingan Permainan Sepak Bola Pemain Psap Sigli Terhadap Pemain Persiraja Banda Aceh Yang Menimbulkan Hilangnya Nyawa ” dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan-pembahasan sebelumnya serta berusaha memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penulisan ini.

A. Kesimpulan

Sepak Bola merupakan olahraga dengan kontak fisik pada setiap permainan. Sering kali terjadi benturan-benturan yang menyebabkan pemain mengalami cedera ringan hingga berat bahkan meninggal dunia. Akan tetapi, hukum pidana melihat bahwa hal tersebut dilakukan dengan seizin korban dan dalam batasan-batasan ketentuan tertentu (dimana menurut pertimbangan dunia kesehatan masih dalam batas aman, tetapi ternyata dampak yang timbul melampaui perhitungan tersebut) maka dapat diterima suatu yang bukan merupakan tindak pidana. Sehingga haruslah memberikan sebuah batasan oleh *Legitimates of Sports* yaitu dalam bentuk adanya persetujuan dari lawan untuk mendapatkan perlakuan keras dari lawan dengan resiko cedera.

Persetujuan yang dimaksud adalah selama tindakan yang dilakukan masih dalam zona teknis permainan. untuk mengidentifikasi apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi

unsur-unsur Tipe dari olahraga yang sedang dipertandingkan, level pertandingan, kondisi budaya permainan, Karakteristik dari tindak kekerasan yang dilakukan, Tingkat kekuatan yang digunakan oleh pelaku, dan Tingkat cedera yang ditimbulkan akibat dari tindakan pelaku.

Berdasarkan pertimbangan pada dasarnya tidak ada unsur kesengajaan dalam kecelakaan pertandingan yang dilakukan para pemain Sepak Bola, murni karena kecelakaan dalam pertandingan sehingga dalam menjalankan perannya sebagai otoritas tertinggi Sepak Bola Indonesia, PSSI melarang segala perkara yang ada didalam Sepak Bola Indonesia diajukan ke Pengadilan Negeri, karena PSSI memiliki yurisdiksi hukum tersendiri. sehingga dalam hal ini apabila terjadi sebuah insiden yang dilakukan dalam zona pertandingan maka PSSI sebagai organisasi resmi memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh komite disiplin dengan menggunakan dasar kode disiplin PSSI karena semua insiden yang terjadi pada saat pertandingan merupakan murni resiko dari setiap pemain sepak bola. sehingga dalam kasus penjaga gawang PSAP Sigli Agus Rahmad pada pertandingan Divisi Utama saat berusaha mencetak gol akibat kealpaannya tersebut maka Agus menerima hukuman berupa sanksi administratif *skorsing* bertanding selama 1 tahun, oleh Komisi Disiplin PSSI pada bulan Mei 2014 karena melanggar Kode Disiplin PSSI Pasal 61 ayat (1) dan (2).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam menganalisis “Unsur Pidana Dalam Pertandingan Permainan Sepak Bola Pemain

Psap Sigli Terhadap Pemain Persiraja Banda Aceh Yang Menimbulkan Hilangnya Nyawa ”.

Semua tindakan yang masuk kedalam kategori *brutal body contact* dan *borderline violence* merupakan pelanggaran disiplin karena merupakan tindakan-tindakan yang masih dilakukan secara teknis, sedangkan tindakan kekerasan yang termasuk kedalam *quasi criminal violence* dan *criminal violence* dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Sehingga diperlukannya batasan atau acuan tindakan-tindakan yang seperti apa yang seharusnya dapat dikategorikan masuk dalam ranah Komite Disiplin PSSI dan perbuatan manakah yang masuk ke dalam ranah perbuatan pidana. Pemain sepakbola diharapkan mampu memiliki kedewasaan dalam bertanding, agar di dalam jiwanya selalu mengutamakan definisi sebagai atlet yaitu jiwa sportifitas, dalam membangun sebuah tim sepakbola yang baik, harus ada program kelas yang diadakan untuk para pemain dalam melakukan sosialisasi dan penekanan bahwa pelanggaran dalam permainan sepakbola yang melewati batas dapat menghancurkan karir pemain tersebut.

PSSI sebagai otoritas tertinggi sepakbola Indonesia harus memperhatikan bahwa kekerasan yang terjadi dalam olahraga sepakbola tidak semuanya merupakan pelanggaran teknis, terdapat batasan-batasan yang menjadi indikator suatu tindak kekerasan masih merupakan pelanggaran disiplin yang menjadi wewenang PSSI, atau sudah masuk kedalam kategori tindak pidana yang menjadi wewenang kepolisian serta hukum pidana nasional. Artinya PSSI tidak secara absolut berwenang mengadili semua kasus kekerasan yang terjadi didalam pertandingan sepakbola nasional di Indonesia. Mengingat status PSSI sebagai

badan hukum seperti yang tertera pada pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953 nomor 18, maka sudah selayaknya PSSI tak memiliki kekebalan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia ketika anggotanya melakukan tindakan yang mengarah kepada suatu tindakan pidana, dan jika PSSI tetap menjalankan statutenya dalam kasus ini, jelas sangat bertentangan dengan KUHP. selain itu diharapkan metode hukum di Indonesia mampu menerapkan peraturan bagi sejauh mana pelanggaran dalam sebuah pertandingan olahraga bisa dapat dikategorikan suatu pelanggaran pidana, agar tidak ada lagi seseorang meninggal akibat pelanggaran dalam permainan sepakbola dan tentunya memberikan kesadaran dalam bentuk efek jera kepada pelakunya.